

Dampak Pemilihan Umum Paruh Waktu terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat



Cakrawala Strategis

2 Desember 2022

Omar Farizi Wonggo
M. Habib Abiyan Dzakwan
Baginda Muda Bangsa



Ringkasan Eksekutif

Amerika Serikat sebagai negara adidaya selalu menjadi variabel penting bagi seluruh negara di dunia untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat akan memberikan dampak, baik positif ataupun negatif, bagi seluruh negara di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu (*midterms election*) yang diselenggarakan pada 8 November 2022 menjadi variabel pengaruh terhadap dinamika tataran politik dunia yang semakin tidak pasti.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sejumlah analisis terhadap hasil pemilu paruh waktu dan dampaknya terhadap

kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil pemilu paruh waktu memiliki empat makna: (1) mengevaluasi bagaimana pemerintah telah bekerja; (2) menilai isu yang menjadi prioritas masyarakat; (3) menata kembali mekanisme cek dan keseimbangan antara badan eksekutif dan legislatif; serta (4) menjadi indikator awal terhadap tren pemilu presiden pada tahun 2024. Adapun temuan analisis menunjukkan bahwa proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung bersifat bipartisan pada Kongres akan cenderung statis sebelum pemilu paruh waktu.

Secara spesifik kebijakan Amerika Serikat terhadap Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF) akan memiliki sinyal positif antara Kongres dan Pemerintahan Biden. Sedangkan, kebijakan terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Rusia, dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC+) menuai sinyal negatif sehingga tekanan Kongres terhadap kebijakan Pemerintahan yang lebih keras cenderung menguat, utamanya dengan Dewan Perwakilan serta kursi ketiga di jajaran pemerintahan Amerika Serikat berada di bawah Partai Republik.

Indonesia, salah satu negara besar di kawasan Indo-Pasifik, perlu memainkan perannya sebagai *stabilizer* dalam mengurai sejumlah tantangan yang mengemuka guna memastikan stabilitas kawasan terjaga. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memanfaatkan kondisi terkini melalui modalitasnya, seperti Keketuaan ASEAN Tahun 2023 dan penggunaan mekanisme multilateral lainnya serta sumber daya nasional, yang dapat menjadi kekuatan dan daya tawar untuk memberikan ruang gerak Indonesia bermanuver sesuai kepentingan nasionalnya.

Pendahuluan

Dinamika politik dan ekonomi Amerika Serikat selalu menjadi perhatian dunia mengingat respons kebijakan Amerika Serikat terhadap suatu isu akan memberikan dampak, baik positif ataupun negatif, bagi seluruh negara di dunia. Pada 8 November 2022, Amerika Serikat baru saja selesai menyelenggarakan pemilu paruh waktu yang menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Biden dalam 2 tahun masa jabatan terakhirnya. Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan signifikansi dari hasil pemilu paruh waktu terhadap konstelasi domestik Amerika Serikat dan proyeksi Pemilu Amerika Serikat tahun 2024. Pengaruh Kongres yang terbagi pada kedua dewan yang masing-masing didominasi oleh partai yang berbeda, memberikan tantangan tersendiri bagi Presiden Biden dalam memilih instrumen politis yang dapat digunakan untuk memenuhi janji politiknya. Selain itu, tulisan ini juga memberikan gambaran terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, utamanya dalam merespons aktivitas major power lainnya, berkaca terhadap interaksi antara Kongres dan Presiden sebelum dan setelah pemilu paruh waktu. Isu kebijakan luar negeri yang bipartisan cenderung tidak terlalu memberikan pengaruh perbaikan terhadap situasi stabilitas internasional. Indonesia perlu memitigasi potensi gejolak yang akan muncul di kawasan, baik eskalasi konflik ataupun krisis ekonomi yang berjalan. Akan tetapi, Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang dari kondisi terkini dengan berbagai modalitas yang dimilikinya untuk memenuhi kepentingan nasional.

Pemilu Paruh Waktu: Definisi dan Urgensi

Pemilu paruh waktu merupakan pemilihan yang diselenggarakan pasca tahun kedua pemerintahan presiden terpilih berlangsung. Dalam pemilu ini, masyarakat Amerika Serikat menentukan pilihannya terhadap dua jenis pengelola pemerintahan: (1) tingkat pusat termasuk Dewan Senat (*house of senate*) dan Dewan Perwakilan (*house of representative*); (2) tingkat daerah termasuk gubernur, sekretaris daerah, jaksa agung, serta Walikota. Tulisan ini hanya akan berfokus pada pengelola tingkat pusat dalam menganalisis dampak terhadap keberlangsungan kebijakan eksekutif, utamanya kebijakan luar negeri, di bawah Pemerintahan Joe Biden. Hasil pemilu paruh waktu ini secara singkat memiliki empat makna: (1) mengevaluasi bagaimana pemerintah telah bekerja; (2) menilai isu yang menjadi prioritas masyarakat; (3) menata kembali mekanisme cek dan perimbangan di antara ketiga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif); serta (4) menjadi indikator awal terhadap tren pemilu presiden pada tahun 2024.

Pada 8 November 2022, Amerika Serikat baru saja selesai menyelenggarakan pemilu paruh waktu dengan pemilihan terhadap anggota Dewan Senat sebanyak 35 kursi dan anggota Dewan Perwakilan sebanyak 435 kursi yang diperebutkan, khususnya oleh kedua partai besar, Demokrat ataupun Republik.¹ Berdasarkan data per 20 November 2022, Partai Republik diproyeksikan memenangkan kontrol atas Dewan Perwakilan dengan perolehan sementara sebesar 218 kursi mengungguli Partai Demokrat yang hanya memperoleh 212 kursi. Sementara, untuk Dewan Senat menunjukkan bahwa Partai Demokrat memimpin tipis dengan total 50 posisi.² Kemenangan ini sayangnya belum dapat dipastikan mengingat masih terdapat satu posisi di Georgia yang akan dilakukan pemilihan ulang pada tanggal 6 Desember 2022 antara kandidat Demokrat [Raphael Warnock] dan kandidat Republik [Herschel Walker].³

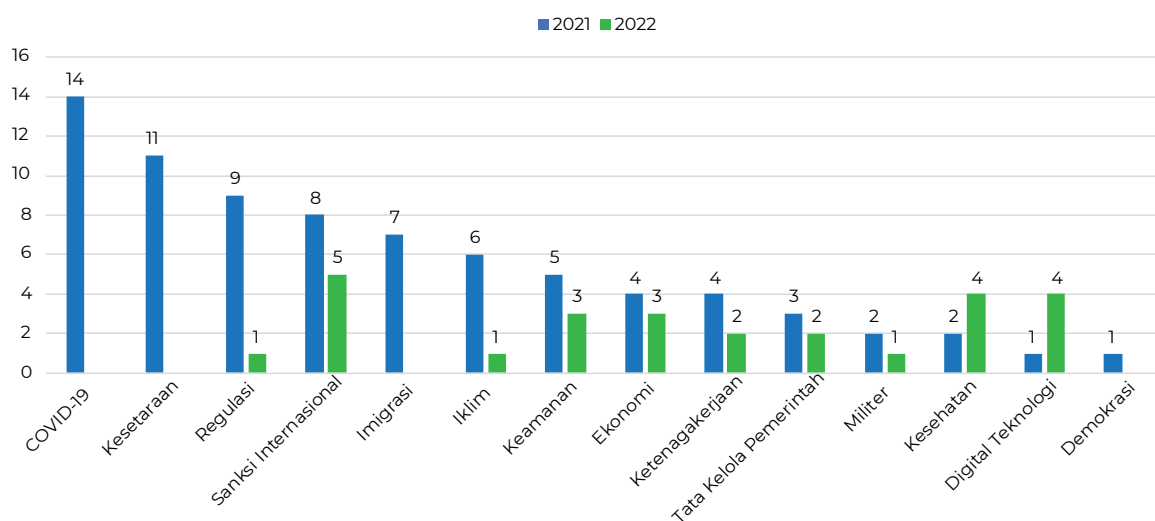
Hasil pemilu sela ini berbeda dari prediksi sebelumnya. Berbagai analisis, baik dari *The Economist*, *The Wall Street Journal*, *CNN*, *The Guardian*, Kevin McCarthy, hingga mantan Presiden Trump, sebelumnya optimis akan kemenangan relatif besar bagi Partai Republik.⁴ Optimisme ini umumnya dikarenakan empat alasan utama. Pertama, skema pembatasan cara pemilihan melalui pengiriman sebelum hari pemilu (*absentee voting*) terutama di negara yang dipimpin oleh Partai Republik. Terdapat lebih dari 20 negara bagian telah mengeluarkan peraturan sejenis ini, dengan harapan untuk memastikan keuntungan bagi Partai Republik.⁵ Kedua, rendahnya angka penerimaan publik terhadap Presiden Joe Biden. Data yang dikumpulkan dari *FiveThirtyEight* dari beragam survei publik menunjukkan bahwa angka penerimaan Biden tidak pernah melebihi 50% sejak pertengahan Agustus 2021. Tiga bulan sebelum pemilu paruh waktu, angka tersebut secara relatif konstan di bawah 43% bahkan sempat mencapai titik terendah selumnya pada Juli 2022 dengan 37.5%.⁶ Ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Data per 20 November 2022 dari *The Washington Post* menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 600 penembakan masal di wilayah Amerika Serikat sepanjang tahun 2022.⁷ Lebih dari 50% responden yang disurvei oleh Pew Research Center pada Oktober 2022 menyebutkan isu kekerasan bersenjata sebagai isu penting dalam pemilu paruh waktu.⁸ Terakhir, tingginya angka inflasi Amerika Serikat di mana, sejak Desember 2021, angka inflasi bulanan Amerika Serikat tidak pernah di bawah 7% dan bahkan mencapai puncak tertinggi selama 40 tahun terakhir (9.1%) pada bulan Juni 2022.⁹ Angka ini dipicu oleh banyak faktor terutama kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok global dan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19, ketidakseimbangan kecepatan pemulihan sisi permintaan yang juga didorong oleh Kebijakan Rencana Penyelamatan Amerika Serikat Presiden Biden pada Januari 2021.¹⁰

Terhadap berbagai isu tersebut, Presiden Biden dan Partai Demokrat sebelumnya telah mengambil kebijakan strategis untuk mempertahankan posisinya. Pertama, Presiden Biden mengusulkan penambahan anggaran untuk pemberantasan tindak kejahatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar \$32 miliar dolar, dengan \$20.6 miliar di antaranya untuk penguatan program dan penegak hukum.¹¹ Kedua, Presiden Biden menerbitkan Peraturan Presiden (*Executive Order/EO*) tentang “Mengamankan Akses terhadap Layanan Reproduksi dan Kesehatan Lainnya”¹² sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat bulan Juni 2022 yang membatalkan perlindungan konstitusi atas hak untuk melakukan aborsi.¹³ Ketiga, Presiden Biden mengumumkan akan mengeluarkan cadangan minyak strategis per Desember 2022 dalam rangka penurunan harga minyak domestik.¹⁴ Terakhir, Dewan Perwakilan mengeluarkan surat panggilan paksa (*subpeona*) terhadap mantan Presiden Donald Trump atas peristiwa serbuan ke gedung dewan 6 Januari 2021 lalu.¹⁵

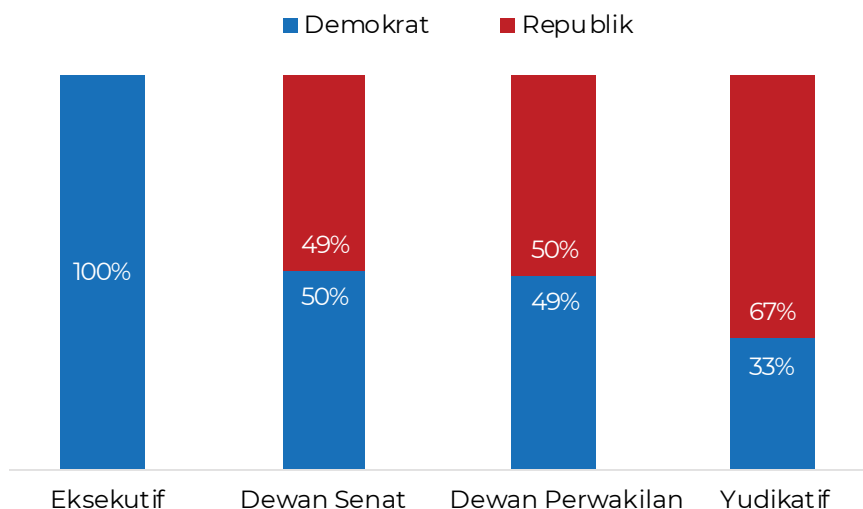
Dengan hasil Kongres terbagi dua antara kedua partai besar, maka tulisan ini mengasumsikan Presiden Biden akan mengalami peningkatan tantangan dari kondisi sebelumnya dalam meloloskan agenda-agenda besarnya terutama yang sifatnya partisan khas Demokrat, seperti demokrasi, perubahan iklim, hak asasi manusia, aborsi, pada Kongres. Terlebih, tantangan tersebut akan semakin nyata apabila pada pemilu Georgia dimenangkan oleh kandidat Partai Republik. Oleh karena itu, arah kebijakan yang akan bergulir diproyeksikan lebih kepada upaya Presiden Biden dalam memenuhi janji pemilunya dengan ruang gerak yang tersisa. Penguatan ekonomi nasional, kesetaraan dan kesejahteraan setidaknya menjadi tiga fokus utama isu domestik, seperti penciptaan lapangan kerja industri otomotif terbaru, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri pada kontrak kerja pemerintahan, dan pengembangan teknologi tinggi.

Sementara, dalam isu yang sifatnya bipartisan termasuk kompetisi dengan negara lain (Rusia dan Tiongkok), tulisan ini memproyeksikan tidak akan banyak mengalami perubahan. Lebih lanjut, isu kebijakan luar negeri akan diprioritaskan pada perubahan iklim, kesehatan global, dan energi. Hal tersebut berkaca dari sejumlah EO yang telah diterbitkan Presiden Biden di masing-masing isu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (bagan 1).

Bagan 1. Pemetaan Penerbitan Peraturan Presiden Amerika Serikat Tahun 2021-2022



Bagan 2. Pemetaan Komposisi Tiga Pilar Pemerintahan Amerika Serikat Pasca Pemilu Paruh Waktu



Peningkatan tantangan yang dimaksud berupa waktu dan proses politik berkaca dari persebaran komposisi pengaruh kedua partai di tiga posisi pemerintahan sebagaimana bagan 2.¹⁶ Hal ini dikarenakan dalam meloloskan suatu regulasi sebelum ditandatangani oleh Presiden dibutuhkan persetujuan dari mayoritas kedua dewan. Dengan posisi kedua dewan dipegang oleh kedua partai yang berbeda, kemungkinan regulasi akan lolos dalam waktu singkat sangatlah kecil. Kedua, untuk mengakhiri perdebatan pendahulu dalam dewan senat dan melanjutkan proses pemungutan suara terhadap suatu draf undang-undang, dibutuhkan persetujuan super mayoritas dari 60 anggota senat. Dalam hal perimbangan kekuatan antara dua partai di Dewan Senat sangat tipis, proses untuk mencapai pemungutan suara di senat menjadi sulit dimungkinkan. Ketiga, kemampuan investigatif yang dimiliki kedua dewan akan memiliki tendensi keduanya untuk saling menginvestigasi satu sama lain. Terakhir, Presiden Biden selama 2 tahun ke depan akan sulit dalam meratifikasi suatu traktat mengingat tidak ada partai dalam Dewan Senat yang menguasai super mayoritas. Dengan demikian, proyeksi skenario terburuk yang dapat terjadi adalah Presiden Biden selama kurun waktu 2 tahun ke depan hanya akan bergerak dengan EO yang dimilikinya dengan catatan tidak ada intervensi dari Mahkamah Agung untuk menganulir EO tersebut. Tendensi penggunaan EO dapat terlihat dengan tingkat penerbitan oleh Presiden Biden di tahun pertamanya sebanyak 77 EO dan 26 EO di tahun keduanya sebagaimana bagan 1.

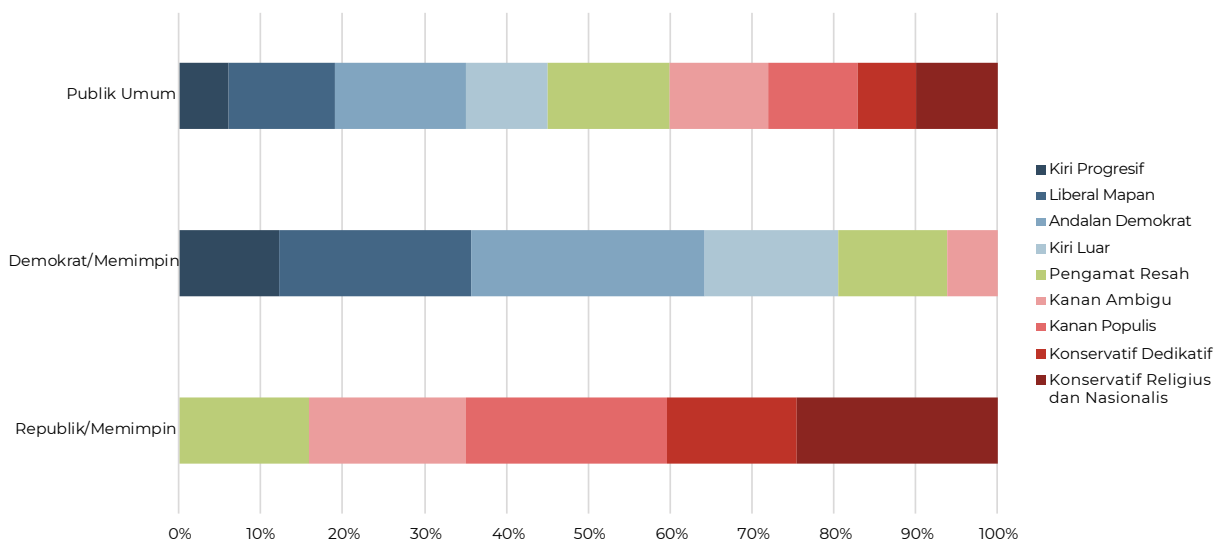
Konstelasi Politik Domestik

Lanskap politik Amerika Serikat saat ini bersifat multipolar dari dua koalisi utama, yakni Demokrat dan Republik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PEW Research Center terdapat delapan tipologi yang membedakan antar fraksi di kedua koalisi utama pasca pemilu Amerika Serikat 2020.¹⁷ Setidaknya terdapat empat tipologi yang berada di dalam koalisi demokrat, yaitu Kiri Progresif (*Progressive Left*), Liberal Mapan (*Establishment Liberals*), Andalan Demokrat (*Democratic Mainstays*), dan Kiri Luar (*Outsider Left*). Kiri Progresif fraksi yang memiliki pandangan sangat liberal utamanya pada isu ketidakadilan antar ras dan ekspansi jaring pengaman sosial. Liberal Mapan memiliki posisi yang sama dengan Kiri Progresif namun meyakini tidak dibutuhkannya reformasi yang cukup masif. Andalan Demokrat merupakan fraksi tertua dan loyalis demokrat yang memiliki kecenderungan moderat untuk beberapa isu. Kiri Luar adalah

fraksi yang berpandangan sangat liberal dan memiliki tingkat frustrasi terhadap sistem politik yang berjalan saat ini, baik dari partai demokrat ataupun para pimpinannya. Sedangkan, Pengamat Resah (*Stressed Sideliners*) merupakan fraksi yang tidak memiliki kejelasan keberpihakan diantara dua koalisi utama dengan tingkat keterlibatan politik yang terendah di antara fraksi lainnya.

Sementara itu, koalisi republik juga memiliki empat tipologi yang berada di dalam tubuhnya, yaitu Konservatif Religius dan Nasionalis (*Faith and Flag Conservatives*), Konservatif Dedikatif (*Committed Conservatives*), Kanan Populis (*Populist Right*), dan Kanan Ambigu (*Ambivalent Right*). Konservatif Religius dan Nasionalis merupakan fraksi yang sangat konservatif yang memiliki pandangan bahwa kebijakan pemerintah perlu untuk mendukung nilai-nilai agama. Konservatif Dedikatif adalah fraksi konservatif yang memiliki pandangan yang lebih lunak utamanya pada isu imigrasi dan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Kanan Populis merupakan fraksi yang berlokasi di pemukiman desa sangat kritis terhadap isu imigran dan aktivitas perusahaan besar Amerika Serikat. Sementara, Kanan Ambigu adalah fraksi termuda dari konservatif yang memiliki pandangan terhadap ukuran pemerintah, sistem ekonomi, dan isu ras gender. Akan tetapi, kanan ambigu satu-satunya fraksi yang memiliki pandangan positif terhadap penggunaan ganja dan aborsi untuk kebutuhan medis dari koalisi republik. Dari kedelapan fraksi tersebut mayoritas konstituen berasal dari fraksi kanan ambigu untuk Partai Republik dan andalan demokrat untuk Partai Demokrat sebagaimana bagan di bawah.

Bagan 3. Tipologi Konstituen Amerika Serikat



Sumber: Doherty et al, "Beyond Red vs. Blue: The Political Typology," PEW Research Center, 2021. <https://www.pewresearch.org/politics/2021/11/09/beyond-red-vs-blue-the-political-typology-2/>

Akan tetapi, pada pemilu paruh waktu 2022 karakteristik konstituen mengerucut setidaknya pada empat tipe pemilih.¹⁸ Pertama adalah pemilih skeptis Trump (*skeptical trump voter*). Tipe ini memiliki keraguan terhadap integritas pemilu yang berlangsung akibat konspirasi palsu yang diinisiasi oleh Trump dan sekutunya sehingga meningkatkan keengganan dalam memberikan suara pemilih utamanya dipihak republik. Kedua adalah Pemilih Muda (*young voter*) yang memiliki pandangan skeptis atas performa pemerintahan Biden, utamanya pada isu layanan kesehatan dan perubahan iklim sehingga terdapat kekhawatiran demokrat tidak berupaya optimal dalam mengatasi permasalahan seperti penyimpangan demokrasi. Ketiga adalah Pemilih Demokrat

yang Kecewa (*the disillusioned democrat*) yang berpandangan bahwa arah negara saat ini mengecewakan sejak kepemimpinan Biden. Terlebih, keputusan Mahkamah Agung akhir-akhir ini dan perubahan budaya di dalam Partai Demokrat menimbulkan ketidakpercayaan pemilih terhadap pemilihan politik. Terakhir adalah Pemilih Republik non-MAGA (*the non-MAGA Republican*). Tipe ini merupakan pemilih moderat republik yang awalnya mendukung Trump tetapi kecewa akibat aksi Trump yang dinilai cukup ekstrem, utamanya pada insiden 6 Januari 2021, sehingga menjadi sasaran partai demokrat untuk meningkatkan pengaruhnya dengan justifikasi keperluan menjaga keberlangsungan demokrasi Amerika Serikat sebagai salah satu kepentingan nasional. Dengan keempat karakteristik tersebut dapat diproyeksikan bahwa mayoritas konstituen menginginkan wajah baru dalam kontestasi pemilu Presiden 2024, baik dari Partai Demokrat dan Partai Republik.

Pemilih Amerika secara umum menempatkan isu domestik sebagai prioritas dalam pemilu sela tahun 2022. Berbagai lembaga survei dan pemikir menyebutkan bahwa tingginya inflasi ataupun buruknya performa ekonomi menjadi sorotan utama bagi pemilih kedua partai.¹⁹ Namun demikian, tidak ada sesuatu yang baru dari tren ini. Berdasarkan data dari Gallup, isu ekonomi selalu menempati posisi teratas dalam enam pemilu sela sejak tahun 2002, apabila dibandingkan dengan isu-isu lain sebagaimana tertera pada tabel 1 (lampiran).²⁰ Di luar isu ekonomi, prioritas isu bagi pemilih kemudian terbagi sesuai afiliasi politiknya masing-masing. Bagi pemilih Demokrat, isu yang terpenting adalah masa depan demokrasi, kesehatan, aborsi, perubahan iklim. PEW Research Center dalam surveinya pada pertengahan Oktober 2022 bahkan menemukan bahwa isu-isu ini sebenarnya mendapatkan posisi lebih tinggi dibandingkan isu ekonomi dengan urutan: (80%, 79%, 75%, 68%, diikuti dengan isu ekonomi — 65%).²¹ Bagi pemilih Republik, isu yang terpenting setelah ekonomi (92%) adalah imigrasi (76%), tindak kriminal (74%), dan masa depan demokrasi (70%).²²

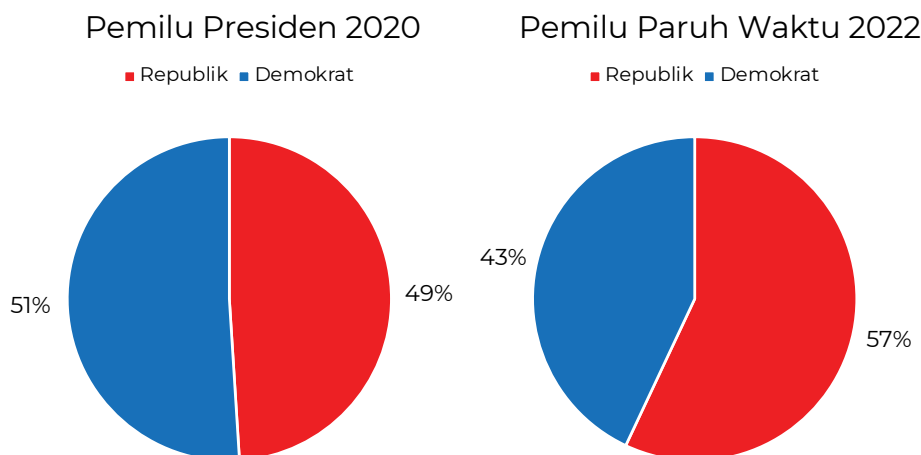
Dengan tipologi pemilih dan tren isu diatas, sekiranya dapat diproyeksikan untuk 2024 bahwa isu populer yang memperoleh sorotan masih konsisten terkait ekonomi, disusul dengan isu kesehatan (aborsi) dan angka kriminalitas yang mengemuka signifikan di tahun 2022. Di lain sisi, proyeksi kandidat yang akan bersaing pada November 2024 akan bermuara pada kedua nama, yaitu Joe Biden dan Donald Trump. Sejumlah kandidat potensial dari Partai Demokrat telah menyatakan dukungannya atas Presiden Biden untuk maju kembali dalam pilpres tahun 2024. Di antara kandidat tersebut adalah Wakil Presiden Kamala Harris dalam pernyataan persnya saat kunjungan ke Filipina (23/11),²³ dan Gubernur California Gavin Newsom yang juga mengutarakan komitmen penuhnya untuk bersama Biden dalam pilpres mendatang terlepas potensi yang dimilikinya.²⁴ Sedangkan, Donald Trump diperkirakan dapat kembali maju apabila ia dapat mengukuhkan posisinya dalam Partai Republik dan meyakinkan pesaingnya Ron De Santis untuk tidak maju walaupun memiliki modalitas dari kesuksesannya sebagai Gubernur Florida.

Pendanaan Politik Kedua Partai pada Pemilu Paruh Waktu

Pada pemilu paruh waktu 2022 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari sisi pendanaan pemilu apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu paruh waktu 2018 di mana meningkat cukup tajam sebesar \$2 miliar dolar.²⁵ Para donor utama memberikan donasi mereka kepada *Political Action Committees* (PACs) yang mengelola keuangan untuk para kandidat Dewan Senat atau Dewan Perwakilan. Komposisi pendanaan yang

terkumpul di dominasi oleh simpatisan republik dan terdapat peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pendanaan untuk pemilu presiden 2020.

Bagan 4. Perbandingan Pendanaan Pemilu Presiden 2020 dan Pemilu Paruh Waktu 2022 Amerika Serikat



Mayoritas sumber donor dari kedua partai berasal dari individu terkemuka pada sektor keuangan (perusahaan investasi), sektor teknologi (*start-up*/perusahaan pengembang *software*), dan sektor properti. Dari kedua pendanaan yang dilakukan teridentifikasi nama yang berulang muncul, baik pada pemilu presiden 2020 dan pemilu paruh waktu 2022 sebagai donor utama di partai afiliasinya masing-masing. Pada Partai Demokrat nama James Simons, Deborah Simon dan Reid Hoffman kembali mengemuka pada pendanaan pemilu paruh waktu 2022. Sedangkan nama Timothy Mellon, Stephen Schwarzman, dan Elizabeth Liz Uihlein muncul kembali sebagai donor bagi Partai Republik pada pemilu paruh waktu 2022.

Implikasi Politik kepada Kebijakan Amerika Serikat terhadap IPEF

IPEF merupakan inisiatif yang digagas oleh eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Biden. Inisiatif ini diluncurkan pada 23 Mei 2022 dengan tujuan untuk membangun kerangka kerja sama ekonomi berdasarkan empat pilar: (1) perdagangan; (2) rantai pasok; (3) ekonomi bersih; (4) ekonomi berkeadilan. Terdapat 14 anggota IPEF, di mana 8 di antaranya adalah anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

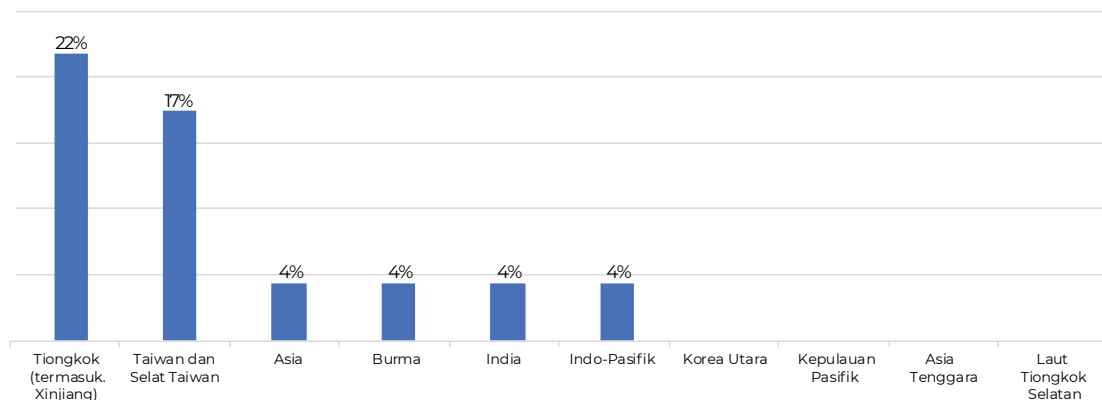
Tren umum pada Kongres Amerika Serikat terhadap IPEF bersifat positif merespons inisiatif Presiden Biden tersebut, utamanya dari Komite Luar Negeri Dewan Perwakilan. Terdapat satu pernyataan pers dari Komite Luar Negeri Dewan Perwakilan dan dua audiensi terkait [Januari dan Maret 2022] sebelum diluncurkannya IPEF. Dukungan yang cukup baik ini didasari oleh keinginan anggota komite secara umum menginginkan peningkatan hubungan perekonomian lebih dalam dengan India, khususnya perihal demokrasi dan kapasitas teknologi. Selain itu, IPEF dipandang sebagai instrumen penyeimbang pengaruh Tiongkok di kawasan pada sektor ekonomi-perdagangan melalui pembangunan rantai pasok unggul dan promosi nilai-nilai universal perlindungan lingkungan dan hak-hak buruh. Upaya tersebut sejalan dengan nilai-nilai utama yang ingin dimajukan oleh Fraksi Partai Demokrat di Komite ini. Sedangkan, kritik terbesar Fraksi Partai Republik terhadap inisiatif IPEF adalah tidak mengikutsertakan Taiwan dalam inisiatif ini.

Namun demikian, kepemimpinan Presiden Biden telah merespons kritik Partai Republik dengan membuat inisiatif bilateral baru di luar IPEF yaitu Inisiatif AS-Taiwan Perdagangan Abad ke-21. Di bawah inisiatif ini, kedua entitas dapat menegosiasikan isu terkait: fasilitasi perdagangan, praktik pengaturan yang baik, anti-korupsi, UMKM, agrikultur, standar, perdagangan digital, tenaga kerja, lingkungan, BUMN, serta kebijakan non-pasar. Secara garis besar, negosiasi ini akan dilakukan di bawah pengawasan Institut Amerika Serikat di Taiwan dan Kantor Representasi Ekonomi dan Kebudayaan Taiwan di Amerika Serikat. Kesepakatan ini secara umum terlihat lebih komprehensif dibandingkan IPEF.

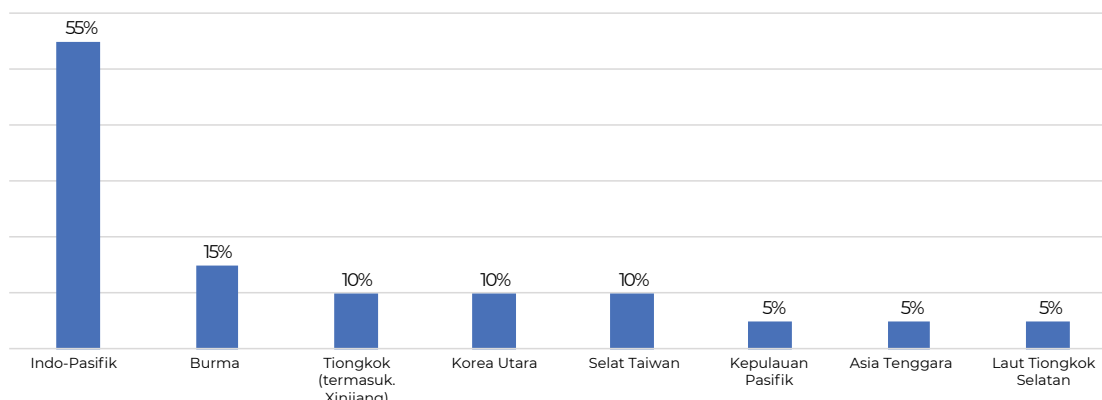
Implikasi Politik kepada Kebijakan Amerika Serikat terhadap Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Melihat hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir tepat rasanya untuk mengatakan bahwa Tiongkok adalah duri dalam daging bagi Amerika Serikat. Bermodalkan mesin ekonomi yang besar Tiongkok secara pasti terus mengganggu pengaruh dan hegemoni Amerika Serikat di dalam perpolitikan global. Krusial dan strategisnya isu Tiongkok bagi Amerika Serikat dapat dilihat salah satunya dari audiensi yang terjadi di kedua dewan. Data audiensi yang dikumpulkan dari Januari 2021 sampai dengan November 2022 menunjukkan bahwa baik Dewan Senat dan Dewan Perwakilan menjadikan isu Indo-Pasifik, Cina, dan Selat Taiwan sebagai topik yang paling sering dibahas sebagaimana bagan 5 dan 6.

Bagan 5. Audiensi Topik Kawasan Asia & Indo-Pasifik di Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Senat (Jan '21 – Nov '22)



Bagan 6. Audiensi Topik Kawasan Asia & Indo-Pasifik di Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan (Jan '21 – Nov '22)



Tensi hubungan kedua negara begitu tinggi di era kepemimpinan Trump dan masih berlanjut di era berikutnya, Joe Biden. Kebijakan perdagangan luar negeri antara Amerika Serikat dan Tiongkok dari Pemerintahan Trump tetap dipertahankan oleh Biden dengan beberapa penyesuaian. Biden mengklaim bahwa kebijakan tarif yang diterbitkannya lebih terstruktur dan terfokus kepada Tiongkok.²⁶ Tidak hanya tarif, kebijakan lain yang juga tetap dipertahankan oleh Biden antara lain adalah seperti sanksi terhadap pejabat Tiongkok atas kebijakan tentang Hong Kong dan Xinjiang, daftar hitam perusahaan Tiongkok, dan pelarangan investasi Amerika terhadap perusahaan Tiongkok yang berafiliasi dengan militer. Dalam pidato pertamanya di depan Kongres, pada bulan April 2021, Presiden Biden menekankan pentingnya meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi Amerika Serikat untuk bersaing dengan Tiongkok.

Pada Juni 2021, atas dorongan dari Amerika Serikat, NATO mengeluarkan *communiqué* yang menyampaikan bahwa selain berfokus terhadap isu Rusia dan terorisme, NATO juga akan berfokus pada ancaman yang muncul dari Tiongkok.²⁷ Hal tersebut menjaga pernyataan perdana NATO yang menyebut ancaman datang dari Tiongkok.

Tensi kedua negara kembali meningkat, melalui *teleconference* dengan Xi Jinping, Ketika Biden menyampaikan akan ada “konsekuensi” apabila Tiongkok memberikan dukungan terhadap Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina. Arah kebijakan Amerika Serikat untuk membendung Tiongkok kembali ditegaskan oleh Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Blinken menyampaikan bahwa untuk membendung Tiongkok, Pemerintahan Biden akan memperkuat investasi di dalam negeri dan memperkuat aliansi dengan sekutu untuk melawan Tiongkok.²⁸ Blinken dalam pidatonya juga menyebut Tiongkok sebagai negara yang mengganggu tatanan internasional. Hubungan keduanya sempat memanas manakala, Ketua Dewan Perwakilan (*house of speaker*) Amerika Serikat, Nancy Pelosi melakukan lawatan ke Taipei sebagai bentuk dukungan terhadap demokrasi Taiwan. Tindakan ini mendorong Pemerintahan Xi Jinping untuk memutus beberapa saluran komunikasi militer tingkat tinggi, menangguk kerja sama iklim Amerika-Tiongkok, dan menyangsi Pelosi. Tidak hanya sampai di situ, Tiongkok juga melakukan gelar militer di sekitar Taiwan dengan meluncurkan rudal balistik di atas Taiwan, mengerahkan armada laut dan menerbangkan pesawat tempur di atas pulau tersebut.²⁹

Untuk menekan perkembangan Tiongkok, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan larangan ekspor semikonduktor. Belasan perusahaan semikonduktor Tiongkok, termasuk Semikonduktor Manufacturing International Corporation (SMIC), perusahaan semikonduktor terbesar Tiongkok masuk ke dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat.

Mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump dan Biden, maka bisa dikatakan bahwa isu Tiongkok merupakan isu bipartisan di Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari kebijakan terhadap Tiongkok yang tidak jauh berbeda antara Trump dan Biden. Kongres pun menunjukkan hal serupa. Inisiatif perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Republik dan Demokrat memiliki nuansa dan tujuan yang sama yakni untuk membendung Tiongkok sebagaimana tabel 2 (lampiran). Dalam konteks hasil pemilihan paruh waktu dapat diproyeksikan agaknya tidak akan ada perubahan signifikan mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Washington akan terus berupaya menjaga statusnya dalam penguasaan teknologi termutakhir, menguatkan industri strategis dalam negeri (antara lain seperti semikonduktor, baja, energi), dan menguatkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik.

Implikasi Politik kepada Kebijakan Amerika Serikat terhadap Hubungan Bilateral dengan Rusia

Tren umum pada isu Rusia adalah cenderung terdapat koherensi pandangan baik yang diambil oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif dalam merespons invasi Rusia di Ukraina. Pandangan tersebut mencakup instrumen besar yang digunakan oleh Amerika Serikat, yaitu instrumen ekonomi.

Satu hari sebelum dimulainya serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Presiden Biden mengeluarkan Peraturan Presiden EO.14065 yang bermaksud untuk melarang investasi Amerika Serikat di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia [Luhansk & Donestk], transaksi perdagangan apa pun antara wilayah tersebut dengan Amerika Serikat, serta menihilkan akses terhadap properti pejabat Rusia terlibat yang berada di AS. Peraturan Presiden ini merupakan instrumen ekonomi pertama di tahun 2022 yang secara fokus membahas Rusia. Hal tersebut dikarenakan lambatnya pembahasan pada Kongres 117 terkait inisiatif untuk membatasi finansial Rusia melalui rancangan undang-undang (RUU) Larangan Hak Penarikan Khusus di Dana Moneter Internasional (IMF) bagi Rusia dan Belarusia. RUU ini diusulkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Partai Republik J. French Hill pada 2 Maret 2022. Namun, dikarenakan belum adanya momentum mendesak, pembahasan mengalami proses penundaan dan revisi beberapa bulan hingga akhirnya menjadi Undang-undang (UU/*Public Law*) No. 117-185 pada 4 Oktober 2022. UU ini mendorong Menteri Keuangan AS untuk tidak terlibat dalam pertukaran Hak Penarikan Khusus dengan Rusia dan Ukraina, serta mengupayakan agar negara lain melakukan hal sama.

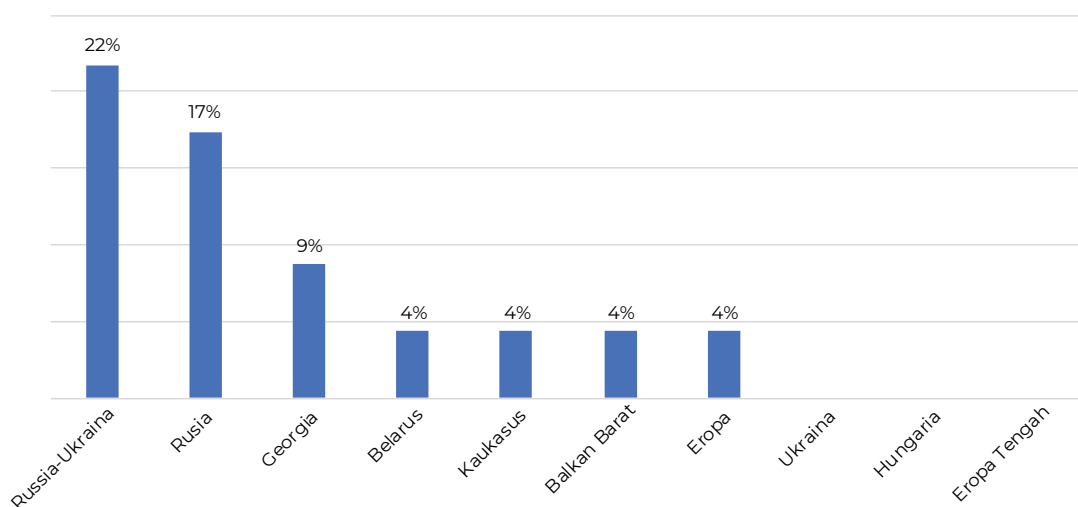
Dua minggu setelah terjadinya invasi, Presiden Joe Biden mengeluarkan EO.14066 pada 8 Maret 2022 yang melarang dilakukannya impor produk energi Rusia oleh Amerika Serikat, baik itu dalam bentuk minyak, batubara, ataupun gas alam. Amerika Serikat juga dilarang untuk melakukan investasi di sektor energi Rusia maupun memfasilitasi transaksi terkait secara formal. Hal ini mendapatkan dukungan bipartisan langsung dari kongres. Pada tanggal yang sama Anggota Dewan Perwakilan Fraksi Partai Demokrat dari Texas, Lloyd Doggett, bersama 33 pengusung lainnya mengusulkan RUU Mengakhiri Impor Minyak Rusia. Pada keesokan harinya dalam proses pemungutan suara, RUU memperoleh dukungan dari mayoritas kongres dengan komposisi 414 menyetujui – 17 menolak, 15 di antara yang menolak tersebut berasal dari Partai Republik. Hanya butuh waktu satu bulan hingga RUU ini menjadi UU No. 117-109. Di satu sisi, implikasi dari UU ini memperkuat legitimasi EO.14066. Tetapi di sisi lain, akan sangat sulit bagi Presiden AS ke depan untuk membatalkan larangan impor minyak Rusia. Dalam UU No. 117-109 ditetapkan prasyarat bahwa untuk pembatalan ini, dibutuhkan keyakinan bahwa Rusia tidak lagi mengancam NATO dan juga perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan kedua dewan di Kongres.

Hanya kurang tiga hari setelah EO.14066, Presiden Joe Biden menerbitkan EO lainnya yaitu EO.14068. EO ini merupakan instrumen ekonomi yang lebih ekspansif. EO.14068 juga menambah daftar larangan tersebut termasuk mengimpor kepada produk unggulan Rusia [perikanan, alkohol, perhiasan], mengeksport komoditas unggulan AS [barang mewah], dan larangan penggunaan dolar. Hal ini juga segera mendapat dukungan bipartisan dari Kongres. Pada tanggal 17 Maret 2022, Anggota Dewan Perwakilan Partai Demokrat Richard E. Neal mengusulkan RUU Penundaan Hubungan Dagang Normal dengan Rusia dan Belarus. Dikarenakan dukungan besar dari 33 pengusung lintas

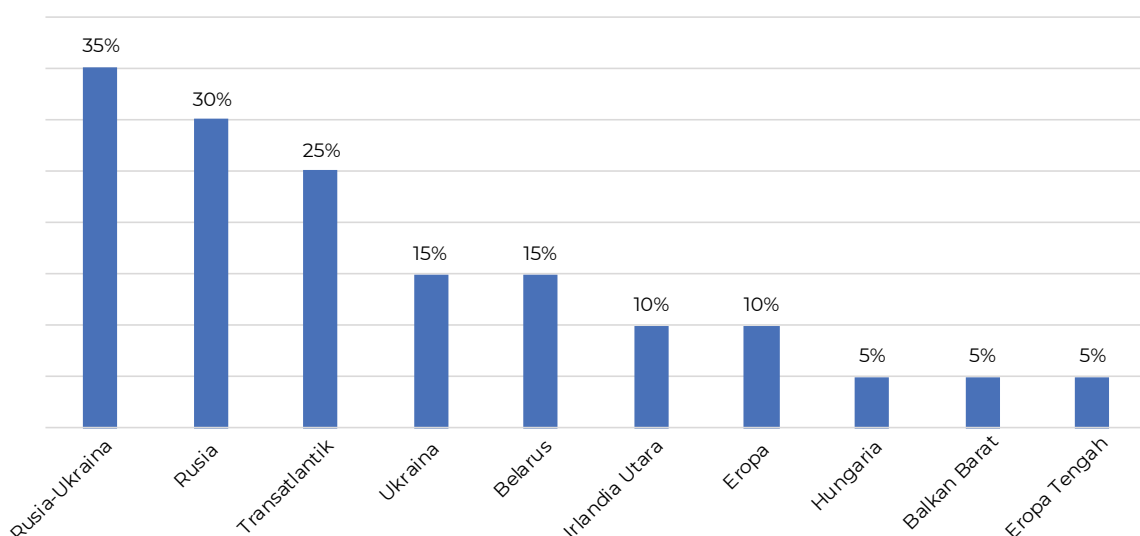
partai dan sejalan dengan prioritas Presiden Joe Biden, RUU ini akhirnya menjadi UU 117-110 dalam kurang dari satu bulan proses. Implikasi dari UU ini adalah menanggukkan kesepakatan WTO tentang situasi perdagangan normal dengan melakukan peningkatan tarif terhadap komoditas ekspor Rusia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun demikian, untuk pemulihan perdagangan Amerika Serikat-Rusia-Belarus ke situasi normal, dibutuhkan pemenuhan prasyarat dan proses yang serupa seperti UU 117-109.

Agresi Rusia yang tidak juga berakhir selama hampir dua bulan, Presiden Biden kemudian memperkuat instrumen ekonominya melalui penerbitan EO.14071 pada 6 April 2022. Peraturan Presiden ini melarang adanya investasi baru dari Warga Negara AS di Rusia, transaksi perdagangan antara kedua negara maupun pendanaan yang difasilitasi oleh pihak ketiga. EO ini merupakan EO yang terakhir diterbitkan dalam rangka merespons Rusia secara khusus.

Bagan 7. Audiensi Topik Kawasan Eropa di Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Senat (Jan '21 – Nov '22)



Bagan 8. Audiensi Topik Kawasan Eropa di Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan (Jan '21 – Nov '22)



Berkaca terhadap interaksi Presiden Biden dan Kongres dalam menentukan kebijakan luar negeri sebagai respons situasi di Eropa Timur, maka dapat diproyeksikan bahwa dominasi Partai Republik pada Dewan Perwakilan tidak akan mengalami pergantian kebijakan terhadap Rusia. Pembahasan yang cukup intens akan terus bergulir dalam pertemuan dengar pendapat yang dilakukan kedua dewan sebagaimana bagan 7 dan 8. Setidaknya sebanyak 8 RUU yang sudah disetujui Dewan Perwakilan dan sedang menunggu persetujuan dari Dewan Senat. RUU tersebut di antaranya membahas penyitaan aset Rusia untuk pemulihan Ukraina pasca perang, isolasi Rusia dari forum-forum diplomatik, membawa akuntabilitas pelaku kejahatan perang Ukraina, serta menghadapi aktivitas Rusia di Afrika. Meskipun isu ini bipartisan, perlu diperhatikan lebih seksama apakah terdapat peluang kesempatan yang dapat dimanfaatkan Partai Republik terkait isu Rusia dalam melemahkan posisi Presiden Biden ataupun Partai Demokrat sebagai langkah persiapan kontestasi di tahun 2024, mengingat Partai Republik memiliki kecenderungan kalkulasi untung-rugi sebagai pertimbangan pembuatan keputusan.

Implikasi Politik kepada Kebijakan Amerika Serikat terhadap Bantuan kepada Ukraina

Pemerintahan Presiden Joe Biden berkomitmen penuh dalam membantu Ukraina menghadapi perang yang berlangsung sejak Januari 2022 ditunjukkan dari komitmen pemberian bantuan sebesar \$53,4 miliar dolar, yang terdiri dari bantuan militer sebesar \$27,9 miliar dolar, bantuan keuangan sebesar \$15,7 miliar dolar dan bantuan kemanusiaan \$9,8 miliar dolar.³⁰ Upaya pemberian bantuan tersebut telah lolos dari pembahasan Kongres dengan disetujuinya empat UU di tahun 2022, yakni 1) UU 117-103 Consolidated Appropriations Act, 15 Maret 2022; 2) UU 117-118 Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, 9 Mei 2022; 3) UU 117-128 Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 21 Mei 2022; dan 4) UU 117-180 Continuing Appropriations and Ukraine Supplemental Appropriations Act, 30 September 2022. Aturan pertama, ketiga dan keempat mengatur perihal pemberian alokasi ke beberapa departemen dan lembaga federal, antara lain penyediaan alokasi untuk peralatan pertahanan, bantuan migrasi dan pengungsi, dukungan peraturan dan teknis mengenai masalah tenaga nuklir, bantuan makanan darurat, bantuan ekonomi, dan penyitaan properti yang terkait dengan invasi, guna membantu Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Sedangkan aturan kedua mengatur pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Presiden untuk mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Ukraina untuk meminjamkan atau menyewakan barang-barang pertahanan. Dengan demikian, selama satu tahun ke depan, Amerika Serikat akan memiliki aturan yang bersifat *lex specialis* dalam mengadakan perjanjian pertahanan dengan Ukraina, termasuk persyaratan yang umumnya melarang pinjaman atau masa sewa lebih dari lima tahun, dengan prosedur percepatan yang ditetapkan eksekutif.

Lebih lanjut, pada 15 November 2022, Presiden Biden melayangkan kembali surat kepada Kongres untuk dapat memberikan dana tambahan \$37,7 miliar dolar sebagai tambahan bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina di saat sebelumnya Amerika Serikat baru saja memberikan bantuan senilai \$400 juta dolar. Permintaan bantuan tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan yang dibutuhkan Ukraina dalam menjalankan pemerintahannya pada situasi perang berlangsung. Saat ini, Ukraina bertumpu dari dana bantuan dalam menjalankan pemerintahannya dikarenakan fungsi keuangan pemerintah masih belum kembali berfungsi secara penuh. Terlebih, Ukraina membutuhkan dana \$38 miliar dolar untuk menutupi defisit anggaran dan menyelenggarakan kegiatan pemulihan awal dengan membangun selter untuk warga yang mengungsi dan memulai aktivitas

perekonomian di saat bersamaan menghadapi serangan pada infrastruktur vital, seperti jaringan energi dan air bersih. Selain itu, Ukraina juga diperkirakan membutuhkan \$105 miliar dolar yang diperuntukkan bagi pembangunan jaringan transportasi serta pemukiman pasca perang usai.

Namun, pasca pemilu paruh waktu Amerika Serikat, mengemuka wacana pemotongan-pergeseran alokasi bantuan yang akan disalurkan Amerika Serikat kepada Ukraina oleh Partai Republik. Rendahnya akuntabilitas dalam proses pembahasan RUU di dalam Kongres di mana debat dan pemantauan yang menjadi fungsi perimbangan dan pengecekan pada Kongres tidak berjalan menjadi dasar utama bagi Partai Republik pada Dewan Perwakilan untuk menyelenggarakan audit terhadap sejumlah bantuan yang diberikan.³¹ Pasalnya apabila dilihat dari segi penyelenggaraan audiensi oleh kedua dewan dalam membahas Ukraina tidak terbilang banyak sebagaimana tertera pada bagan 7 dan 8.

Terlebih, Kevin McCarthy, Ketua Minoritas Dewan Perwakilan yang akan diproyeksikan menjadi Ketua Dewan Perwakilan, menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu berhenti memberikan “cek kosong” kepada Ukraina tanpa adanya audit dan pengawasan yang akuntabel serta mempertimbangkan besaran kontribusi yang dilakukan oleh aliansinya, NATO, kepada Ukraina. Lebih lanjut, Anggota Dewan Perwakilan Partai Republik dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, menyelenggarakan konferensi pers untuk mengenalkan resolusi yang akan dibawanya ke Kongres guna menginisiasi audit-investigasi dana bantuan ke Ukraina. Greene menuntut transparansi atas penyaluran bantuan yang terbilang besar dalam durasi singkat tanpa adanya pemantauan yang akuntabel. Greene juga membandingkan antara jumlah pendanaan bantuan yang diberikan ke Ukraina dan beberapa pendanaan yang dibutuhkan dalam negeri, seperti keamanan perbatasan atau penguatan pasar uang domestik.

Sementara itu, wacana pergeseran alokasi bantuan yang bergulir dari Partai Republik adalah pengalihan bantuan ekonomi dan keuangan menjadi bantuan militer. Pengalihan tersebut dapat diproyeksikan dengan memperhatikan sifat UU dan RUU yang diusung dari masing-masing partai. Pada tabel 4 (lampiran) dapat dilihat bahwa sejumlah peraturan yang diusung oleh Partai Demokrat mayoritas bersifat pemberian bantuan keuangan dan kemanusiaan untuk membangun Ukraina pasca perang. Sedangkan peraturan yang diusung oleh Partai Republik mayoritas bersifat militer dan upaya penilaian terhadap kondisi perang berlangsung. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa daftar inisiatif RUU yang telah bergulir didominasi oleh usulan dari Dewan Perwakilan yang sebelumnya dikuasai oleh Partai Demokrat.

Selain itu, keraguan terhadap akuntabilitas pemberian bantuan yang dirasakan Partai Republik juga tidak terlepas oleh pengalaman masa lalu yang dilalui Amerika Serikat.³² Pasca perang dunia kedua, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada negara-negara korban perang melalui Marshall Plan. Marshall Plan dirancang untuk memberikan relaksasi terhadap restriksi ekonomi yang terjadi di Eropa dan menyelesaikan isu kekurangan nilai tukar asing ditujukan memberikan ruang gerak industri untuk berkembang. Tingkat efektivitas bantuan yang digunakan cukup beragam di mana Marshall Plan berhasil dalam memulihkan perekonomian Jerman, sedangkan kurang berhasil pada Prancis, Italia, dan Inggris dikarenakan pengalokasian yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan potensi korupsi. Prancis menggunakan mayoritas bantuan untuk menyokong perusahaan nasional yang terdampak perang. Italia menggunakan bantuan dalam memenuhi komoditas impor yang bersifat habis

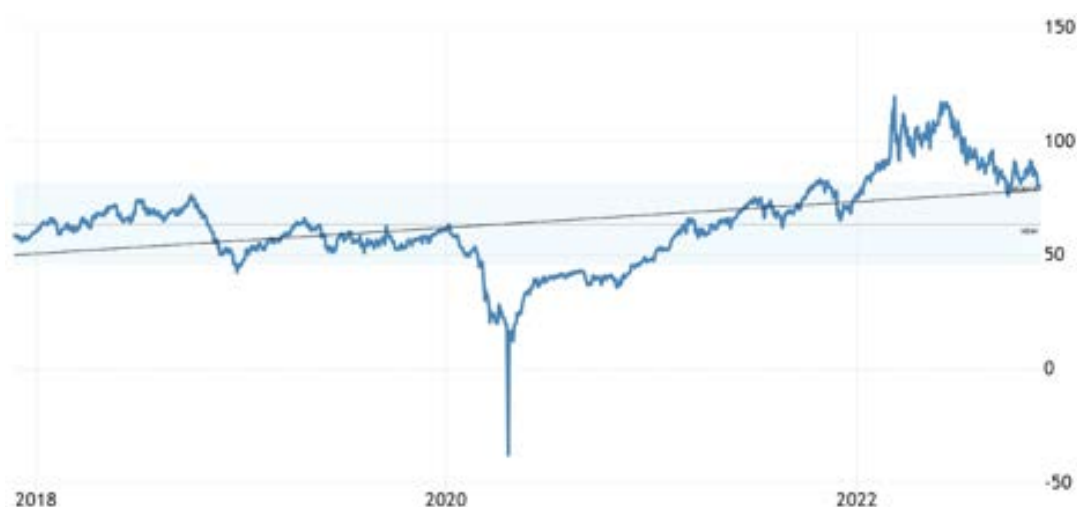
pakai. Sedangkan Inggris menggunakan mayoritas bantuan untuk membayar utang perang. Berkaca terhadap hal tersebut, kondisi Ukraina saat ini masih belum memiliki pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi dan dikhawatirkan besarnya dana bantuan rekonstruksi menjadi pemantik mengemukanya kembali praktik korupsi di atas rasa nasionalisme sebagaimana dinyatakan oleh Ivan Lakhtionov dari Transparansi Internasional.

Akan tetapi, proyeksi terhadap pemberhentian total pengalokasian dana bantuan bagi Ukraina sangat kecil kemungkinannya akan lolos pembahasan Kongres diakibatkan tiga hal. Pertama, kurang optimalnya performa dari fraksi kanan populis ataupun Trumpist. Ketika pemilihan paruh waktu, sehingga tidak terdapat peningkatan pengaruh atas posisi tidak setuju terhadap pemberian bantuan Ukraina. Kedua, kursi Senat yang dikuasai demokrat dapat digunakan untuk melakukan amandemen apabila terdapat RUU atau resolusi yang bergulir dari pembahasan Anggota Dewan. Ketiga, apabila terdapat kebuntuan atau penolakan dari Kongres, Presiden Biden masih dapat menerbitkan EO untuk dapat menugaskan para badan federal menjalankan kebijakannya tanpa menunggu persetujuan Kongres.

Implikasi Politik kepada Kebijakan Amerika Serikat terhadap Polemik dengan Negara Anggota OPEC+

Agar dapat memahami hubungan Amerika Serikat dan OPEC+ perlu untuk menelaah perkembangan interaksi antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sebagai “pemimpin” OPEC+. Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden, Trump kerap memberi kritik kepada Arab Saudi dan juga OPEC+. Akan tetapi, retorik dan sentimen negatif ini berubah manakala ia terpilih menjadi Presiden. Terlepas dari agenda kedaulatan energi yang diusung Trump serta kritik yang ia berikan kepada OPEC+, di bawah kepemimpinan Trump hubungan antara Washington dan Riyadh berada dalam kondisi yang sangat baik.³³ Penasihat Saudi bahkan mengatakan pertemuan Trump dan Pangeran Salman menjadi titik balik bersejarah dalam hubungan kedua negara baik secara politik, militer, dan ekonomi.³⁴ Di tengah kondisi pandemi, Presiden Trump berhasil meminta Arab Saudi, Rusia, dan Meksiko dan anggota OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak di masing-masing negara.³⁵

Bagan 9. Pergerakan Harga Minyak Dunia Tahun 2018-2022



Sumber: “Crude Oil - 2022 Data,” Trading Economics, 2022, <https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil>.

Di kepemimpinan Biden, romantisme hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi berakhir. Arah kebijakan Biden yang kerap mengkritisi politik domestik Saudi mengenai isu Hak Asasi Manusia, utamanya mengenai kematian jurnalis Jamal Kashogi, perbedaan pandangan tentang menyikapi nuklir Iran, agenda menggantikan minyak bumi dengan energi terbarukan menjadi penghalang hubungan baik kedua negara. Alhasil, ketika harga minyak dunia meningkat tajam akibat dari Perang Rusia-Ukraina, Biden yang meminta OPEC+ menaikkan pasokan minyak mendapat penolakan dan bahkan membuat OPEC+ dan negara produsen minyak lainnya sepakat untuk menurunkan produksi minyak. Washington menilai negatif tindakan yang diambil oleh OPEC+ dan menilai pemotongan produksi minyak yang dilakukan sebagai bentuk dukungan OPEC+, terutama Arab Saudi, kepada Rusia.³⁶ Tidak lama dari keputusan OPEC+ untuk memotong produksi minyak mereka, Biden mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi dan OPEC+ akan memperoleh “konsekuensi” dan Amerika Serikat akan meninjau kembali arah hubungan Washington dan Riyadh.³⁷

Partai Demokrat sendiri melihat kebijakan OPEC+ sebagai sebuah penghinaan. Salah satu anggota Partai Demokrat di Senat, Bob Menendez, Ketua Dewan Senat untuk Komite Hubungan Luar Negeri, mendorong untuk diberhentikannya segala bentuk kerja sama bilateral dengan Arab Saudi termasuk penjualan senjata ke negara tersebut. Beberapa anggota Partai Demokrat juga menunjukkan pandangan yang sama dengan Menendez. Selain itu, Partai Demokrat juga berkeinginan untuk membahas kembali RUU bipartisan yang berjudul NOPEC (*No Oil Producing and Exporting Caterls*) yang memungkinkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk melaporkan Arab Saudi dan anggota OPEC atas pelanggaran *antitrust*. Di lain sisi, Partai Republik mencoba memanfaatkan kegagalan Partai Demokrat dalam menurunkan harga minyak untuk mendorong agenda peningkatan produksi minyak domestik Amerika Serikat.

Pasca pemilihan paruh waktu diproyeksikan hubungan antara Amerika Serikat dan OPEC+, terutama Arab Saudi, masih akan merenggang. Terlebih, dengan retorik Biden dan Partai Demokrat yang ingin “menata kembali” hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi akan mendapat dukungan bipartisan di kedua dewan.

Proyeksi Stabilitas Geopolitik dan Geoekonomi: Rekomendasi bagi Indonesia

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tulisan ini menggunakan asumsi skenario Dewan Perwakilan akan berada dibawah Partai Republik sedangkan Dewan Senat akan berada dibawah Partai Demokrat dengan selisih pada kedua dewan cukup tipis. Kebijakan luar negeri Presiden Biden yang dipandang bipartisan, seperti isu IPEF, hubungan bilateral dengan Tiongkok, Rusia, ataupun polemik OPEC+, di kedua dewan diproyeksikan tidak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dilihat dari interaksi perkembangan masing-masing dewan dengan Presiden terhadap isu tersebut..

Terkait inisiatif IPEF, perkembangan terakhir yang telah berjalan adalah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri pertama di Los Angeles pada September 2022 lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Perekonomian ataupun Menteri Perindustrian negara Indo-Pasifik. Lebih lanjut, inisiatif IPEF akan melakukan negosiasi pada tingkat pejabat senior pertama pada 10-15 Desember 2022 di Brisbane, Australia. Apabila IPEF dapat diformalkan menjadi perjanjian kerja sama perdagangan lintas benua dengan kualitas di bawah *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), memiliki daya saing terhadap mekanisme perjanjian perdagangan

RCEP, maka dapat diproyeksikan kompetisi antar kedua negara adidaya tersebut akan terus berlanjut.

Lebih lanjut, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok diproyeksikan tetap memanas, utamanya pada isu Taiwan. Meskipun isu Tiongkok dan Taiwan adalah isu bipartisan, terdapat kemungkinan isu Taiwan akan dimainkan oleh Partai Republik untuk menciptakan kebisingan di Pemerintahan Biden. Secara historis Partai Republik memang memiliki pendekatan yang lebih “keras” dibandingkan Partai Demokrat perihal kebijakan luar negeri, termasuk mengenai Taiwan. Kunjungan Pelosi ke Taiwan telah menjadi preseden baru atas sejauh mana pejabat tinggi Amerika Serikat dapat memberikan dukungan kepada Taiwan. Berkaca pada apa yang telah dilakukan oleh Pelosi dan Partai Demokrat, Partai Republik berkemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih berisiko untuk mengganggu kepemimpinan Demokrat.³⁸ Tetapi, menimbang implikasi atau risiko yang sangat tinggi dari memainkan isu Taiwan, sangat mungkin Partai Republik malah tidak akan mengambil langkah-langkah ekstrem mengenai isu ini. Namun, yang tentu adalah dengan dikuasanya Ketua Dewan Perwakilan oleh Partai Republik, Biden akan mendapat tekanan untuk memberikan kebijakan yang lebih keras terhadap Tiongkok.

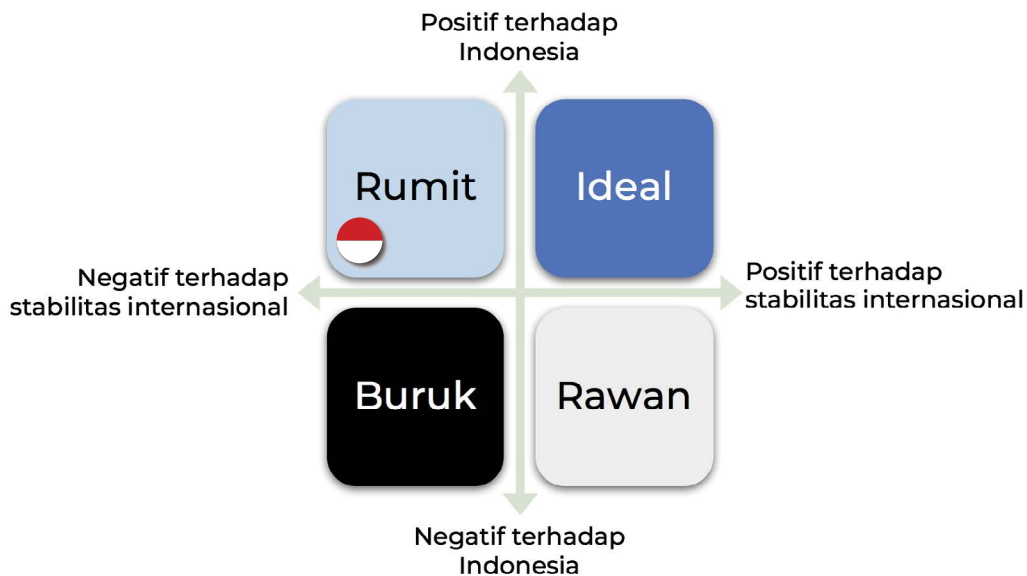
Sementara itu, pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Rusia diproyeksikan tidak akan mengalami perubahan terkait kebijakan yang tengah berjalan. Posisi bipartisan Kongres terhadap Rusia justru dapat menjadi pelumas bagi Pemerintahan Biden dalam mengambil kebijakan terhadap Rusia, baik secara bilateral ataupun multilateral. Namun, kembali digaris bawahi untuk tetap memantau perkembangan terkini atas dampak dari berlarutnya Perang Eropa Timur serta sejumlah sanksi yang diterapkan Amerika Serikat menjadi bumerang tersendiri yang secara tidak langsung akan memperburuk kondisi domestik Amerika Serikat. Apabila potensi tersebut timbul dan tidak dapat dimitigasi oleh Presiden Biden ataupun Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan sebagian isu Rusia akan menjadi isu partisan yang akan dimanfaatkan oleh Partai Republik.

Di sisi lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Ukraina, sebagai dampak dari Perang Eropa Timur, terkait pengiriman bantuan pada periode perang juga diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan pengiriman bantuan akan terus berlanjut, baik di bidang militer, kemanusiaan, ataupun keuangan. Proyeksi tersebut akan berjalan dengan prasyarat pelaksanaan audit ditunda pada Kongres 118 ataupun hasil audit membuahakan laporan positif. Akan tetapi, apabila wacana terkait investigasi audit pemberian bantuan yang disalurkan tahun 2022 lolos pada Kongres dan hasil audit membuahakan laporan negatif maka pada tahun berikutnya proses pemberian bantuan akan menghadapi sejumlah tantangan, seperti durasi proses penyelesaian regulasi bertambah, jumlah bantuan yang berkurang untuk masing-masing bidang, hingga pemberhentian sementara pemberian bantuan.

Terlebih, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang tidak kunjung membaik berpotensi menghambat kepentingan nasional Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah. Salah satunya adalah sulit dikendalikannya harga minyak sebagai implikasi dari kebijakan Biden dan Partai Demokrat terhadap Arab Saudi dan OPEC+. Dengan asumsi permintaan minyak dunia yang stabil atau naik dikarenakan perekonomian yang terus membaik dan keengganan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak, maka besar kemungkinan harga minyak dunia akan terus melambung. Di kuasanya Dewan Perwakilan oleh Partai Republik sendiri rasanya tidak akan berdampak banyak terhadap hubungan Amerika Serikat dan OPEC+. Partai Republik kemungkinan besar akan fokus

pada agenda domestik mereka yakni meningkatkan produksi minyak nasional Amerika Serikat.

Bagan 10. Skenario Implikasi Pemilu Paruh Waktu Amerika Serikat 2022 terhadap Indonesia



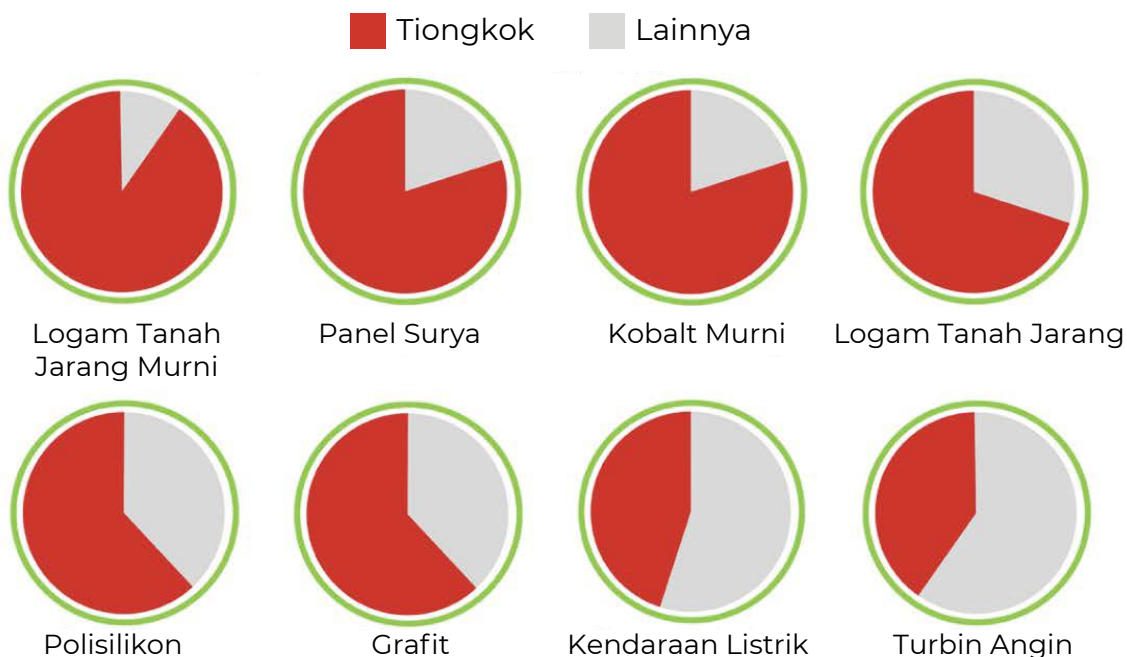
Dinamika kebijakan Amerika Serikat, utamanya dalam merespons *major power* lainnya di berbagai kawasan, menjadi tantangan yang cukup besar bagi Indonesia dan menempatkan situasi terkini dikategorikan “rumit” sebagaimana bagan di atas. Terlebih, pasca pemilu paruh waktu, diproyeksikan tidak ada kebijakan Pemerintahan Biden yang akan berhenti dari sebelumnya ataupun akan diboikot oleh Dewan Perwakilan pada Kongres 118 terkait persaingan dengan *major power* lainnya. Kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan memasuki babak baru pasca pertemuan Biden dan Xi di Bali pada KTT G20 November lalu. Hasil pertemuan lanjutan Blinken ke Tiongkok diawal tahun 2023 akan menjadi penentu apakah kompetisi kedua negara akan semakin menajam atau akan ada relaksasi diantara keduanya mengingat pendekatan baru yang akan diimplementasikan Amerika Serikat. Apabila terdapat relaksasi maka Biden dapat menggunakan momentum tersebut untuk mempercepat denuklirisasi Korea Utara guna janji politiknya. Akan tetapi, kembali perlu diperhatikan terkait potensi lawatan yang akan dilakukan Ketua Dewan Perwakilan, Kevin McCarthy, ke Taipei dalam menunjukkan kehadiran dan dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan yang dapat menyulut kembali konflik kedua negara yang berujung terhadap ketidakstabilan kawasan.

Sementara itu, persetujuan antara Amerika Serikat dan Rusia akan terus memanas dan mengakibatkan potensi krisis pangan akan berlarut, utamanya terkait pupuk sebagai komoditas yang disandera oleh Rusia merespons sanksi Amerika Serikat. Relaksasi sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia sulit untuk terjadi mengingat sanksi tersebut sudah tertancup sebagai regulasi resmi dan prasyarat yang cukup pelik untuk dapat dipenuhi oleh Moskow. Selain krisis pangan, krisis energi juga akan membayangi perkembangan geoekonomi ke depan berkaca dari posisi Amerika Serikat dan Arab Saudi yang belum menemui titik temu serta kondisi domestik Amerika Serikat, baik eksekutif ataupun legislatif, yang memiliki satu suara dalam mendukung kebijakan anti-OPEC sebagai respons fluktuasi harga minyak dunia akibat kebijakan OPEC+.

Beragam tantangan tersebut perlu dihadapi dan dikelola Indonesia guna mengurai situasi “rumit” yang diproyeksikan akan berlangsung untuk 1-2 tahun ke depan. Peran sebagai *stabilizer* kawasan dalam mengelola ketegangan antar pihak dapat menjadi strategi yang dimainkan Indonesia. Terlebih, momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 bisa digunakan secara penuh dalam mengelola isu kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan. Apabila terdapat peningkatan ketegangan yang tajam di Laut Tiongkok Selatan, maka Indonesia dapat menyelenggarakan pertemuan darurat guna memitigasi eskalasi yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Indonesia perlu seksama dalam merespons inisiatif IPEF mengingat minimnya keberlanjutan inisiatif tersebut pasca Pemerintahan Biden dikarenakan saat ini IPEF hanya melekat pada eksekutif. Selain itu, terdapat intensi dari Kongres untuk mendorong Pemerintahan Biden menegosiasikan larangan penggunaan platform informasi logistik dan transportasi Tiongkok (LOGINK) diterapkan di pelabuhan negara-negara anggota IPEF. Hal ini akan membatasi ruang gerak Indonesia sebagai penengah dan juga mengingat Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Di lain sisi, Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang kompetisi antara *major powers*. Sebagai contoh, dari sisi ekonomi, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden dan Partai Demokrat memiliki agenda energi terbarukan. Mirisnya input untuk energi terbarukan seperti kobalt, panel surya, dan berbagai metal langka lainnya banyak dikuasai oleh Tiongkok. Kondisi ini menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia yang kaya akan materi sumber daya energi terbarukan serta dapat memacu perkembangan transisi energi nasional.

Bagan 11. Persebaran Penguasaan Rantai Pasok Energi Terbarukan



Sumber: Graham Allison, et al. “The Great Economic Rivalry: China vs the U.S.” Paper, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Maret 23, 2022.

Sementara itu, terkait polemik Amerika Serikat dan OPEC+, Indonesia selaku negara importir minyak akan menjadi pihak yang dirugikan dari bertenggernya harga minyak dunia. Langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dalam situasi ini adalah membangun kerja sama cadangan energi strategis di tingkat regional. Cadangan energi strategis ini dapat digunakan sewaktu-waktu apabila harga minyak menjadi sulit terkendali. Secara historis terdapat preseden kerja sama regional sebagai praktik baik, yakni Chiang Mai Initiative untuk sektor keuangan. Selain itu, untuk sektor pangan semenjak tahun 2010 ASEAN telah memiliki ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) sebagai bentuk kerja sama regional dengan tujuan untuk menguatkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan malnutrisi di kawasan. Kesuksesan inisiatif kerja sama regional ini dapat direplikasi dan ditingkatkan sebagai upaya preventif menghadapi instabilitas pasar energi dunia.

Tim Penulis berterima kasih kepada Michael Christian Budianto atas bantuan yang diberikan dalam hal pengumpulan data. Kemampuan Budianto yang sangat mumpuni berkontribusi secara signifikan dalam proses analisis yang dilakukan.

Lampiran

Tabel 1. Derajat Kepentingan Isu terhadap Pemilih Amerika pada Pemilu Sela sejak 2002 (Dalam % Sangat Penting)

Isu	2002	2006	2010	2014	2018	2022
Ekonomi	37	40	63	44	34	49
Aborsi	17	27	-	-	-	42
Tindak Kriminal	-	-	-	-	-	40
Kebijakan Senjata	21	-	-	-	37	38
Imigrasi	-	33	38	31	40	37
Hubungan dengan Russia	-	-	-	-	-	31
Perubahan Iklim [Sebelumnya: Lingkungan]	28	-	28	17	28	26

Sumber: Saad (Gallup, 2022)

Tabel 2. Daftar Inisiatif terkait Kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok berdasarkan Partai Pengusung

No	Partai Republik	Partai Demokrat
I	TAIWAN	
1	S.3192 — 117th Congress (2021-2022) Taiwan Deterrence Act	S.4428 — 117th Congress (2021-2022) Taiwan Policy Act of 2022
2	H.R.9010 — 117th Congress (2021-2022) Taiwan Policy Act of 2022	S.1169 — 117th Congress (2021-2022) Strategic Competition Act of 2021
3	S.4813 - 116th Congress (2019-2020) Taiwan Relations Reinforcement Act of 2020	
II	TEKNOLOGI DAN KEAMANAN SIBER	
1	H.R.4521 — 117th Congress (2021-2022) United States Innovation and Competition Act of 2021	H.R.3344 - 117th Congress (2021-2022) Transatlantic Telecommunications Security Act
2	H.R.2621 — 115th Congress (2017-2018) Strengthening Security in the Indo-Asia-Pacific Act	H.R.7372 — 117th Congress (2021-2022) Protecting Semiconductor Supply Chain Materials from Authoritarians Act

No	Partai Republik	Partai Demokrat
3	S.4142 — 117th Congress (2021-2022) Preventing PLA Acquisition of United States Technology Act of 2022	H.R.3426 — 117th Congress (2021-2022) Democracy Technology Partnership Act
4	H.R.1131 — 117th Congress (2021-2022) China Technology Transfer Control Act of 2021	H.R.4521 — 117th Congress (2021-2022) United States Innovation and Competition Act of 2021
III	SEMIKONDUKTOR	
1	H.R.8104 — 117th Congress (2021-2022) Defense Semiconductor Stockpile Act	
2	S.1419 — 117th Congress (2021-2022) PCBETTER Act of 2021	
3	S.3933 — 116th Congress (2019-2020) CHIPS for America Act	
IV	PERDAGANGAN	
1	H.R.6001 — 115th Congress (2017-2018) Fair Trade with China Enforcement Act	S.4112 — 117th Congress (2021-2022) Economic Statecraft for the Twenty-First Century Act
2	S.3361 — 115th Congress (2017-2018) Fair Trade with China Enforcement Act	

Tabel 3. Daftar Inisiatif terkait Pemberian Sanksi kepada Rusia

No	Partai Republik	Partai Demokrat
1	UU 117-109 Ending Importation of Russian Oil Act	UU 117-185 Russia and Belarus SDR Exchange Prohibition Act
2	UU 117-110 Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act	H.R.496— 117th Congress To oppose violations of religious freedom in Ukraine by Russia and armed groups commanded or otherwise supported by or acting on behalf of Russia.
3	H.R.7081— 117th Congress Ukraine Comprehensive Debt Payment Relief Act	H.R.7312— 117th Congress A bill to prohibit nationals of the Russian Federation and Belarus from working in Department of Energy National Laboratories.
4	H.R.7372— 117th Congress Protectin Semiconductor Supply Chain Materials from Authoritarians Act	H.R.6891— 117th Congress Isolate Russian Government Officials Act
5	H.R.6930— 117th Congress Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act	H.R.7066— 117th Congress Russia and Belarus Financial Sanctions Act of 2022
6	H.R.6846— 117th Congress Corruption, Overthrowing Rule of Law, and Ruining Ukraine: Putin’s Trifecta Act	H.R.7276— 117th Congress Ukraine Invasion War Crimes Deterrence and Accountability Act
7	H.R.7311— 117th Congress Countering Malign Russian Activities in Africa Act	H.R.7314 AXIS (Assessing Xi’s Interference and Subversion) Act
8	H.R.7372— 117th Congress Protecting Semiconductor Supply Chain Materials from Authoritarians Act	H.R.7312 A bill to prohibit nationals of the Russian Federation and Belarus from working in Department of Energy National Laboratories.

Ket: ■ UU dan ■ RUU

Tabel 4. Daftar Inisiatif terkait Bantuan kepada Ukraina berdasarkan Partai Pengusung

No	Demokrat	Republik
1	UU 117-103 Consolidated Appropriations Act	UU 117-118 Democracy Defense Lend-Lease Act
2	UU 117-128 Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act	H.R.7276— 117th Congress Ukraine Invasion War Crimes Deterrence and Accountability Act
3	UU 117-180 Continuing Appropriations and Ukraine Supplemental Appropriations Act	H.R.7002— 117th Congress Gateway Solidarity Act
4	H.R.7081— 117th Congress Ukraine Comprehensive Debt Payment Relief Act	
5	H.R.6930— 117th Congress Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act	

Ket: ■ UU dan ■ RUU

Tabel 5. Daftar Inisiatif terkait OPEC berdasarkan Partai Pengusung

No	Partai Republik	Partai Demokrat
1	S.977 — 117th Congress (2021-2022) NOPEC	S.2929 — 115th Congress (2017-2018) OPEC Accountability Act of 2018
2	H.R.2393 — 117th Congress (2021-2022) NOPEC	
3	H.R.545-115th Congress (2017-2018) United States Commission on the Organization of Petroleum Exporting Countries Act	

Catatan Akhir

1. "Election results 2022", Ballotpedia, 21 November 2022, https://ballotpedia.org/Election_results,_2022
2. Hasil perhitungan menggunakan data berbagai publikasi yang diterbitkan oleh media, seperti the Washington Post, Politico, Bloomberg Government, CBS, The Economist, NYTimes, CNN, dan LATimes. Oleh Politico: "2022 Elections," Politico, diperbarui 22 November 2022, <https://www.politico.com/2022-election/results/house/>. Oleh Bloomberg Government: "2022 House Election Results," Bloomberg, diperbarui 22 November 2022 <https://www.bloomberg.com/graphics/2022-us-election-results/house/>. Oleh CBS: "Live Election Results," CBS News, 18 November 2022 <https://www.cbsnews.com/midterms/2022/house/>. Oleh The Economists: "America's 2022 midterm elections," The Economists, diakses 20 November 2022, <https://www.economist.com/mid-terms-2022>. Oleh LA Times: "2022 U.S. midterm elections: Live results," Los Angeles Times, 22 November 2022, <https://www.latimes.com/projects/2022-election-US-house-senate-governors-live-results/>. Oleh NY Times: "Path to 218: Tracking the Remaining House Races," The New York Times, 17 November 2022, https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/10/us/elections/results-house-seats-elections-congress.html?action=click&state=default®ion=hub&context=storyline_hub&module=styln-2022-midterms&variant=show&pgtype=LegacyCollection. Oleh 270: "House Update: Four Seats Uncalled; GOP Majority Will Have 220-222 Seats," 270toWin, 19 November 2022, https://www.270towin.com/news/2022/11/19/house-update-four-seats-uncalled-gop-majority-will-have-220-222-seats_1439.html. Oleh CNN: "Live Election," CNN, diakses 19 November 2022, <https://www.cnn.com/election/2022/results/house?election-data-id=2022-HG&election-painting-mode=projection&filter-key-races=false&filter-flipped=false>. Oleh the Washington Post: "Midterm Elections 2022," The Washington Post, 19 November 2022, https://www.washingtonpost.com/elections/midterms-2022/?reload=true&_id=1668993446819
3. Ilison Pecorin, "What difference would a 51-seat Senate Democratic majority make?", abcnews, 15 November 2022, <https://abcnews.go.com/Politics/difference-51-seat-senate-democratic-majority-make/story?id=93278188>
4. Lihat analisis dan interview prediksi hasil pemilihan paruh waktu yang dipublikasikan oleh the Economist, Wall Street Journal, the Hill dan CNN. Oleh the Economist: "Our midterm prediction points to major gains for the Republican," The Economists, 4 November 2022, <https://www-economist-com.proxy1.library.jhu.edu/graphic-detail/2022/11/04/our-midterm-predictions-point-to-major-gains-for-the-republicans>. Oleh Wall Street Journals: Joshua Jamerson, "Midterm Election Campaigning Intensifies Across U.S. in Closing Days," WSJ, 6 November 2022, https://www.wsj.com/articles/midterm-election-campaigning-intensifies-across-u-s-in-closing-days-11667730808?mod=livecoverage_web. Tim Hanrahan, "Elon Musk to Independents: Vote for Republicans," WSJ, 7 November 2022, https://www.wsj.com/livecoverage/midterms-elections-voting-2022-11-07/card/elon-musk-to-independents-vote-for-republicans-hNQnVasbLgxtrBRWkV9v?mod=Searchresults_pos7&page=13. Alex Leary, "Trump Sees 'Red Wave' in Election but Says Senate in Flux," WSJ, 1 November 2022, <https://www.wsj.com/livecoverage/midterms-elections-voting-2022-10-31/card/trump-sees-red-wave-in-election-but-says-senate-in-flux-qPQYqqg2nbhOixFO3jCk>. Oleh CNN: Harry Enten, "A Republican wave in the House is still quite possible," CNN, 16 Oktober 2022, <https://www.cnn.com/2022/10/16/politics/house-republicans-red-wave-midterms-oregon>. Melanie Zanona dan Kristin Wilson, "Exclusive: Kevin McCarthy previews Republicans' plans for the majority – starting at the border," CNN, 7 November 2022, <https://www.cnn.com/2022/11/07/politics/kevin-mccarthy-interview-border-security>. Oleh the Hill Douglas E. Schoen, "How the impending red wave could become a tsunami," The Hill, 31 Oktober 2022, <https://thehill.com/opinion/campaign/3712202-how-the-impending-red-wave-could-become-a-tsunami/>. Oleh the Guardian Joan E. Greve, "Republicans appear better positioned than ever ahead of midterms," The Guardian, 5 November 2022, <https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/05/midterms-polls-latest-democrats-republicans-predictions>

5. "How the seeds of GOP voter suppression are bearing fruit in Texas," The Washington Post, 28 February 2022, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/02/28/republican-voter-suppression-texas-bearing-fruit/>;
David A. Love, "Republican Party is waging a nationwide assault on voting rights," AlJazeera, 3 May 2022, <https://www.aljazeera.com/opinions/2022/5/3/republican-party-is-waging-a-nationwide-assault-on-voting-rights>;
Melissa Brown, "Study: Restrictive voting laws more prevalent in Republican-controlled states with diverse populations," USA Today, 7 Agustus 2022, <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/08/03/brennan-center-report-voting-restrictions-prevalent-gop-states/10226602002/>
6. "How unpopular is Joe Biden?," FiveThirtyEight, diperbarui 22 November 2022, <https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/>
7. Julia Ledur dan Kate Rabinowitz, "There have been more than 600 mass shootings so far in 2022," The Washington Post, diperbarui 20 November 2022, <https://www.washingtonpost.com/nation/2022/06/02/mass-shootings-in-2022/>
8. "Midterm Voting Intentions are Divided, Economic Gloom Persists," Pew Research Center, 20 Oktober 2022, <https://www.pewresearch.org/politics/2022/10/20/the-midterm-elections-and-views-of-biden/#h-top-midterm-issues-the-economy-future-of-democracy>
9. "Current US Inflation Rates: 2000-2022," U.S. Inflation Calculator, diakses 20 November 2022, <https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/>;
Irina Ivanova, "Inflation hit 9.1% in June, highest rate in more than 40 years," CBS News, 13 Juli 2022, <https://www.cbsnews.com/news/inflation-june-cpi-report-hit-new-high-40-years-9-1-percent/>
10. "Inflation in the U.S. Economy: Causes and Policy Options," Congressional Research Service, 6 Oktober 2022, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47273/2>;
Laurence M. Ball et al, "Understanding U.S. Inflation During the COVID Era," IMF, 28 Oktober 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/10/28/Understanding-U-S-525200>
11. "Fact Sheet: The Biden Administration's 21 Executive Actions to Reduce Gun Violence," The White House, 11 Juli 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/11/fact-sheet-the-biden-administrations-21-executive-actions-to-reduce-gun-violence/>
12. "Fact Sheet: President Biden Issues Executive Order at the First Meeting of the Task Force on Reproductive Healthcare Access," The White House, 3 Agustus 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/03/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-at-the-first-meeting-of-the-task-force-on-reproductive-healthcare-access-2/>
13. "Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health," U.S. Supreme Court, Oktober 2021, https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf;
Nina Totenberg dan Sarah McCammon, "Supreme Court overturns Roe v. Wade ending right to abortion upheld for decades," NPR, 24 Juni 2022, <https://www.npr.org/2022/06/24/1102305878/supreme-court-abortion-roe-v-wade-decision-overturn>
14. "Fact Sheet: President Biden to Announce New Actions to Strengthen U.S. Energy Security, Encourage Production, and Bring Down Costs," The White House, 18 Oktober 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/18/fact-sheet-president-biden-to-announce-new-actions-to-strengthen-u-s-energy-security-encourage-production-and-bring-down-costs/>
15. "Select Committee Subpoenas Donald Trump," U.S. House, 21 Oktober 2022, <https://january6th.house.gov/news/press-releases/select-committee-subpoenas-donald-trump-bolton-ms-wilson-wy-pursuant-unanimous>
16. "The Legislative Branch," The White House, diakses 20 November 2022, <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-legislative-branch/>
17. Carroll Doherty et al. "Beyond Red vs. Blue: The Political Typology," 9 November 2021, <https://www.pewresearch.org/politics/2021/11/09/beyond-red-vs-blue-the-political-typology-2/>
18. Blake Hounshell, "4 types of voters we're watching in the Midterms", 7 September 2022, <https://www.nytimes.com/2022/09/07/us/politics/voters-midterms-influens.html>

19. Josh Boak dan Hannah Fingerhut, "VoteCast: Inflation top concern, but democracy a worry too," AP, 9 November 2022, diakses 28 November 2022, <https://apnews.com/article/2022-midterm-elections-abortion-biden-inflation-cf4dffe87a7c2fd1bdd58df0346e15dc>. Lihat juga: Katherine Schaeffer dan Ted Van Green, "Key facts about U.S. voter priorities ahead of the 2022 midterm elections," Pew Research Center, 3 November 2022, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/03/key-facts-about-u-s-voter-priorities-ahead-of-the-2022-midterm-elections/>; Chris Miller, "The economics of 5 big election issues," Brookings, 1 November 2022, <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2022/11/01/the-economics-of-5-big-election-issues/>; Lydia Saad, "Economy is Top Election Issue; Abortion and Crime Next," Gallup, 31 Oktober 2022, <https://news.gallup.com/poll/404243/economy-top-election-issue-abortion-crime-next.aspx>
20. Lydia Saad, "Economy is Top Election Issue; Abortion and Crime Next," Gallup, 31 Oktober 2022, <https://news.gallup.com/poll/404243/economy-top-election-issue-abortion-crime-next.aspx>
21. "Midterm Voting Intentions are divided, economic gloom persist," Pew Research Center, 20 Oktober 2022, <https://www.pewresearch.org/politics/2022/10/20/the-midterm-elections-and-views-of-biden/#h-top-midterm-issues-the-economy-future-of-democracy>
22. "Midterm Voting Intentions are divided, economic gloom persist," Pew Research Center, 20 Oktober 2022, <https://www.pewresearch.org/politics/2022/10/20/the-midterm-elections-and-views-of-biden/#h-top-midterm-issues-the-economy-future-of-democracy>
23. Jonathan Martin, "Newsom Told the White House He Won't Challenge Biden," Politico, 26 November 2022, <https://www.politico.com/news/2022/11/26/gavin-newsom-wont-challenge-joe-biden-00070829>
24. A.R. Hoffman, "Jared Polis Emerges as the Democrats' Answer to Ron DeSantis," New York The Sun, 11 November 2022, <https://www.nysun.com/article/jared-polis-emerges-as-the-democrats-answer-to-ron-desantis>
25. Karl Evers-Hillstrom, "Here are the 10 biggest donors in the midterm election," <https://www.thehill.com/business-a-lobbying/3720141-here-are-the-biggest-donors-in-the-midterm-election>
26. Asma Khalid, "Biden Is Keeping Key Parts of Trump's China Trade Policy. Here's Why," NPR, 2021, sec. Politics, <https://www.npr.org/2021/10/04/1043027789/biden-is-keeping-key-parts-of-trumps-china-trade-policy-heres-why>.
27. "Brussels Summit Communiqué" (NATO, 2021), https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm.
28. "The Administration's Approach to the People's Republic of China," United States Department of State (blog), 2022, <https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/>.
29. "Tracking the Fourth Taiwan Strait Crisis," China Power Project, 2022, <https://chinapower.csis.org/tracking-the-fourth-taiwan-strait-crisis/>.
30. Institute for World Economy Kiel, "Ukraine Support Tracker," <https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/>
31. Josh Rogin, "The next Congress could cause Ukraine to lose the war," <https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/10/repUBLICan-congress-us-aid-ukraine/>
32. "A New Marshall Plan," The Economist, 12-18 November 2022.
33. Clifford Krauss, "Trump Criticizes OPEC, Calling Oil Prices 'Artificially' High," The New York Times, 2018, sec. Business, <https://www.nytimes.com/2018/04/20/business/energy-environment/trump-opec-oil-prices.html>.
34. "Saudi Deputy Crown Prince, Trump Meeting a 'turning Point,' Saudi Advisor Says," CNBC, 2017, <https://www.cnbc.com/2017/03/14/saudi-deputy-crown-prince-trump-meeting-a-turning-point-saudi-advisor-says.html>.
35. "Saudi Deputy Crown Prince, Trump Meeting a 'turning Point,' Saudi Advisor Says," CNBC, 2017, <https://www.cnbc.com/2017/03/14/saudi-deputy-crown-prince-trump-meeting-a-turning-point-saudi-advisor-says.html>.

36. Robert Rapier, "OPEC Thumbs Its Nose At President Biden," Forbes, 2022, <https://www.forbes.com/sites/rrapier/2022/10/05/opec-thumbs-its-nose-at-president-biden/?sh=12763abe3f8e>.
37. Steve Holland, "Biden Vows Consequences for Saudi Arabia after OPEC+ Decision," Reuters, 2022, sec. World, <https://www.reuters.com/world/us-president-biden-re-evaluating-relationship-with-saudi-after-opec-decision-2022-10-11/>.
38. Jiachen Shi, Andrew Devine, and Lin (Kirin) Pu, "The 'Taiwan Card' in US Domestic Politics," The Diplomat, 2022, <https://thediplomat.com/2022/10/the-taiwan-card-in-us-domestic-politics/>.